



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(LAKIP) TAHUN 2023



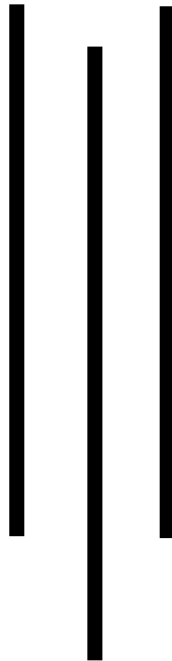
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L A K I P)

TAHUN 2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KATINGAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemampuan dan pola pikir yang baik, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2023 ini telah tersusun sesuai rencana dan jadwal yang telah ditentukan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007, sebagaimana upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilar yang berkesinambungan maka pada Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang kami susun dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Katingan dan Bupati Katingan selaku Kepala Daerah. Penyusunan LAKIP ini telah mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP pertama ini tidak lepas dari kekurangan guna upaya perbaikan akuntabilitas kami lakukan bersama – sama dengan pembenahan manajemen pemerintahan lainnya, seperti penyusunan anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah. Dan masih terdapat hal –hal lain yang masih harus diperbaiki guna mewujudkan VISI Kabupaten yaitu :

**“Katingan “BERMARTABAT” Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera
“BERMARTABAT” (Berbudaya, Maju, Religius, Terintegrasi, Berkesinambungan,
Aman dan Terbuka) “**

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan apabila terdapat kekurangan dari penyusunan laporan ini mohon kiranya dapat dimaklukkan oleh karna keterbatasan. Sekian dan terima kasih.

Kasongan, Januari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Katingan,

GEORGE HEPLIN EDWAR DODDY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670220 198911 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. KEADAAN PEGAWAI	3
1.3. ISU-ISU STRATEGIS	4
1.4. KEADAAN SARANA PRASARANA	5
1.5. KEUANGAN	5
1.6. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. VISI DAN MISI	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	13
2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	16
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	18
3.3. REALISASI ANGGARAN	28
3.4. ANALISIS EFISIENSI	34
3.5. KOLABORASI LINTAS SEKTORAL	34
BAB IV	
PENUTUPAN	36
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan menyusun Rencana Strategi (Renstra) untuk tahun 2018 – 2023 pada pelaksanaan pemerintahan selama tahun 2023 ini mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan tersebut. Tahap penting lain dalam akuntabilitas kinerja yaitu pengukuran dan pelaporan kinerja. Dalam laporan kinerja ini disajikan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2023 sebanyak 2 (dua), yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan.
2. Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei”
(Semangat dalam Persatuan dan Kesatuan)

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh kebijakan dan program yang selengkapny dapat dilihat pada Bab II atau pada lampiran perencanaan strategis (PS). Pada Bab III Capaian kinerja sasaran menunjukkan hasil yang baik, hal itu tidak lepas dari kebijakan yang diambil dan pelaksanaan program – program dan kegiatan.

Analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan sementara ini masih dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

Agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dapat ditingkatkan manfaatnya, maka pada tahun yang akan datang dikembangkan suatu sistem pengukuran kinerja, sehingga dapat dilakukan berbagai analisis keberhasilan program dan kebijakan.

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dilaksanakan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan tahun 2023, di harapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di dalam pelaksanaan Program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan merumuskan kebijakan teknis, membina, melaksanakan koordinasi, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebagai berikut :

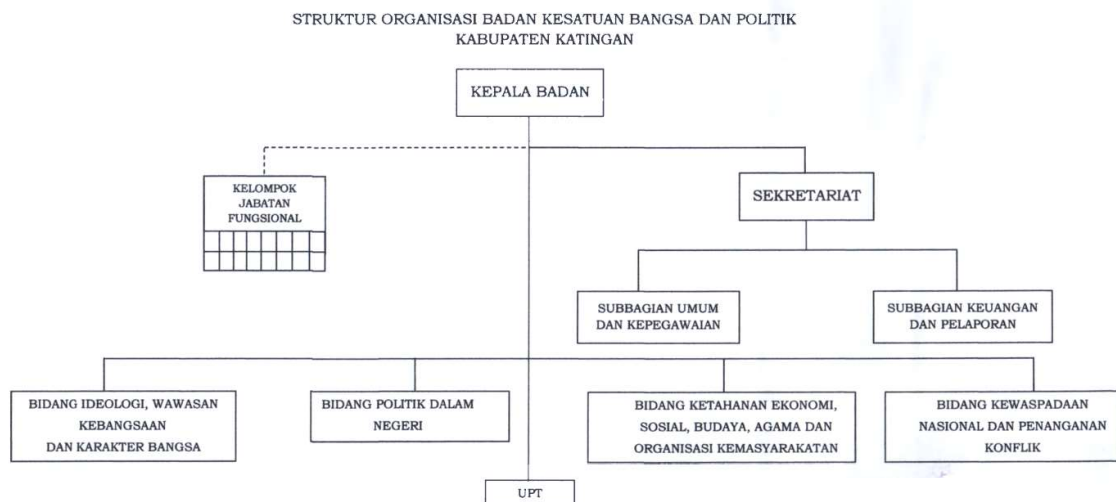
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Katingan;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan;
- Pelaksanaan fungsilainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Susunan organisasi pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - b. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis.



1.2. Keadaan Pegawai

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki daftar pegawai berdasarkan jabatan, Pangkat dan Golongan seperti yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

No	Jabatan	Pangkat / Gol	Jumlah
A	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)		
1.	Kepala Badan	Pembina Utama Muda (IV.c)	1 Orang
2.	Sekretaris Badan	Pembina Tingkat I (IV.b)	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina (IV.a)	1 Orang
		Penata Tingkat I (III.d)	2 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	Penata Tingkat I (III.d)	2 Orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Tingkat I (III.d)	2 Orang
6.	Jabatan Fungsional Umum	Pembina (IV.a)	1 Orang
		Penata Muda Tingkat I (III.b)	1 Orang
		Pengatur (II.c)	1 Orang
B.	NON-ASN		
1.	Operator Komputer	Pegawai Harian Lepas	12 orang
2.	Pramu Kebersihan	Pegawai Harian Lepas	5 orang
3.	Sopir Kepala Badan	Pegawai Harian Lepas	1 Orang

Berikut ini daftar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan disajikan pada tabel berikut

No	Jenis Pendidikan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	-	
A.	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)						
1.	Strata – II	2	1				3 orang
2.	Strata – I	3	4				7 orang
3.	Diploma – III		1				1 orang
4.	SMA / Sederajat			1			1 orang
B.	NON-ASN						
1.	Strata – I					7	7 orang
2.	Diploma – III					1	1 orang
3.	SMA / Sederajat					10	10 orang
Jumlah		5	6	1	0	18	30 orang

1.3. Isu-isu Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang strategik yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang berkembang dimasyarakat yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Ada Beberapa isu-isu strategis yang sedang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya berasal dari dalam SOPD (internal) dan dari luar SOPD (eksternal) yaitu :

- 1) Isu strategis yang berasal dari Internal SOPD seperti :
 - Terjadi perubahan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD;
 - Terjadi perubahan kebijakan daerah tentang anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program/ kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan ;dan
 - Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD.

2) Isu Strategis yang berasal dari eksternal SOPD seperti :

- Pandemi Covid-19 sudah masuk ke Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Katingan;
- Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Perlu peningkatan dalam partisipasi partai politik, Ormas/LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi, kehidupan yang rukun dan damai;
- Masih adanya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Katingan yang tidak mendaftar untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.
- Rawan terjadinya konflik antara warga lokal baik dengan perusahaan perkebunan maupun perusahaan pertambangan akibat adanya pembukaan lahan yang mencaplok dan merusak lahan warga dan tanah adat;
- Keadaan masyarakat Kabupaten Katingan yang plural dan homogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial.
- Kurangnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam proses demokratis serta kerawanan konflik dalam proses Pemilu maupun Pilkada.
- Masih terdapat isu-isu yang bernuansa SARA yang beredar dikalangan masyarakat terkait nuansa Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres walaupun tahapannya baru akan dimulai dari tahun 2023 dan pelaksanaan pemilu di tahun 2024.

1.4. Keadaan Sarana dan Prasaranan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, diperlukan sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. (Lampiran)

1.5. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.033.402.670,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 10.789.224.473,- dan belanja Modal sebesar Rp. 244.178.179,-. Pada perubahan anggaran murni melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 7 Tahun 2023 belanja Operasi menjadi sebesar Rp. 23.031.258.773,- dan belanja modal sebesar Rp. 222.335.247,-

No	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Operasi	Rp. 23.031.258.773,-
2.	Belanja Modal	Rp. 222.335.247,-
	Jumlah Total Anggaran (Setelah Perubahan)	Rp. 23.253.594.020

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang alasan disusunnya LAKIP serta manfaatnya, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kondisi Pegawai, Isu-isu Strategis, Sarana dan Prasarana, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi, prestasi serta inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi, prestasi serta inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan menggunakan dasara pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2018 – 2023. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan merupakan manifestasi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Katingan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Katingan nomor 64 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapanya dituangkan dalam Cascade RPJMD Kabupaten Katingan 2018 – 2023 sebagai berikut :

Visi **Kabupaten Katingan** adalah sebagai berikut :

Visi	Misi	Sasaran Daerah
"KABUPATEN KATINGAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA"	Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif serta Mewujudkan Supermasi Hukum	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel
	Membangun Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Gotong Royong serta Harmonisasi antar Lapisan Masyarakat dalam Heterogenitas Agama, Suku, Adat Istiadat dan Sosial Budaya	Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (Semangat dalam Persatuan dan Kesatuan)

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah **Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (Semangat dalam Persatuan dan Kesatuan)** dengan indikator sasaran **Jumlah Konflik Sara**. Selain itu juga mendukung sasaran **Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel** dengan indikator **Nilai SAKIP**.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan selama 5 tahun anggaran seperti pada tabel berikut :

No	Tujuan PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Jumlah Konflik Sara	Kasus	0	0	0	0	0	0
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan	Nilai Sakip	Predikat	CC	B	B	B	B	B

Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Jumlah Konflik Sara	Kasus	0	0	0	0	0	0
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	Predikat	CC	B	B	B	B	B

2.1.3. Strategis, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		4. Penyediaan Bahan/Material
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
2.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3. Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		6. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
		1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
		Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, berserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja dan sudah menyesuaikan Target Kinerja Perubahan dan Anggaran Perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip (Predikat)	B
2.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Jumlah kasus SARA (Kasus)	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 3.373.863.792	APBD
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 80.393.592	APBD
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 80.393.592	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.186.634.415	APBD
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.186.634.415	APBD
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 16.000.000	APBD
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 16.000.000	APBD
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 553.983.887	APBD
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 35.000.000	APBD
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 46.440.000	APBD
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.178.648	APBD
	4. Penyediaan Bahan/Material	Rp. 152.989.489	APBD
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 298.375.750	APBD
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp. 222.335.247	APBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Daerah		
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 222.335.247	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.129.019.310	APBD
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 60.740.000	APBD
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 68.279.310	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.185.497.341	APBD
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 155.571.531	APBD
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 23.137.640	APBD
	3. Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 6.788.170	APBD
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp. 1.307.576.393	APBD
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.307.576.393	APBD
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 12.235.849	APBD
	2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 728.053.161	APBD
	3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 278.987.383	APBD
	4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 278.300.000	APBD
	5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 10.000.000	APBD
	6. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rp. 0	APBD
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. 16.061.845.000	APBD
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 16.061.845.000	APBD
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 3.000.000	APBD
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 15.924.895.000	APBD
	3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 133.950.000	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 1.529.482.038	APBD
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Rp. 1.529.482.038	APBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Kemasyarakatan		
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 5.200.000	APBD
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 1.422.297.038	APBD
	3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 101.985.000	APBD
	4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 0	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 543.320.000	APBD
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 543.320.000	APBD
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 5.000.000	APBD
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 450.000.000	APBD
	3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 83.320.000	APBD
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 437.506.797	APBD
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 437.506.797	APBD
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 7.391.609	APBD
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 625.188	APBD
	3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 216.000.000	APBD
	4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 97.790.000	APBD
	5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 2.500.000	APBD
	6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 113.200.000	APBD

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik alokasi anggaran sebesar **Rp. 11.033.402.670,-** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp. 10.789.224.473,-** dan belanja Modal sebesar **Rp. 244.178.179,-**. Pada perubahan anggaran murni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2023 belanja Operasi menjadi sebesar **Rp. 23.031.258.773,-** dan belanja modal sebesar **Rp. 222.335.247,-**

No	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Operasi	Rp. 23.031.258.773,-
2.	Belanja Modal	Rp. 222.335.247,-
	Jumlah Total Anggaran (Setelah Perubahan)	Rp. 23.253.594.020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	Predikat	B	B	100%
2.	Meningkatnya kesadaran hukum, kesadaran politik serta keharmonisan dalam masyarakat Kab. Katingan	Jumlah kasus SARA	Kasus	0	0	100%

Pada tahun anggaran 2023 kondisi antara target dan realisasi semua tercapai, karena indikator untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan untuk nilai Sakip yaitu bersumber dari LHE SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Katingan dengan memperoleh Nilai 66,65 dengan kategori “Baik” yang artinya akuntabilitas sudah baik, memiliki sistem yang sudah dapat digunakan untuk manajemen kinerja.

Untuk Target dan Realisasi dari jumlah Konflik Sosial dan Konflik antar umat Beragama dengan satuan kasus. Untuk konflik sosial yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2023 semuanya sudah bisa ditangani dan diredam sehingga tidak menjadi konflik yang besar dan capaian untuk konflik sosial 0 kasus

sehingga capaian (100%) dan untuk konflik antar umat beragama di Kabupaten Katingan pada tahun 2023 masih belum ditemukan kasus besar karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan selalu gencar memberi sosialisasi kepada masyarakat seperti Wawasan Kebangsaan, Memberdayakan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Katingan dalam sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat antarsuku melalui forum tersebut, selain dari pada itu Kesbangpol juga melaksanakan giat Tim Kewaspadaan, FORKOPIMDA, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Dini dimana satgas tersebut dibentuk lintas instansi seperti dari Internal Kesbangpol, Badan Intelijen Negara, Badan Strategis TNI, Kodim 1019 Katingan dan Polres Katingan, Tokoh Agama, tokoh adat/suku.

Perbandingan data konflik sara yang terjadi dengan konflik sara yang tertangani dapat di lihat sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah yang sudah Ditangani	Realisasi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Konflik Sosial	6	6	0
2.	Konflik Agama	0	0	0
3.	Konflik Ekonomi	0	0	0
4.	Konflik Budaya	0	0	0

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk rinci setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan”

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan turut serta membantu ketercapaian sasaran daerah yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, dalam aspek tersebut masuk dalam kategori stabilitas kemananan karena tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi sasaran Badan Kesbangpol sebagai OPD Pendukung, bentuk dukungan melalui upaya-upaya pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan antara lain dengan pembentukan Tim Penanganan Konflik, Tim Kewaspadaan Dini, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	Hasil LHE SAKIP Kesbangpol oleh Inspektorat

Kinerja Nilai Sakip pada Badan Kesatuan meningkat dari tahun ke tahun dengan nilai yang dicapai sebagai berikut :

No	Indikator Strategis	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 Thn target Akhir
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai Sakip	B	B	B	100	B	100%

3.2.2. Sasaran “Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (Semangat dalam Persatuan dan Kesatuan)”

Ketercapaian sasaran pada point 3.2.1 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya sebagai pendukung salah satu aspek stabilitas keamanan, maka pada sasaran ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan termasuk dalam OPD yang berperan secara langsung dalam aspek pencegahan atau preventif. Tolak ukur capaian sasaran OPD pada sasaran ini adalah penyelesaian konflik Sara yang ada di Wilayah Kabupaten Katingan yang dihitung dari formula perhitungan yaitu jumlah Konflik sosial, Konflik Agama, Konflik Suku/Ras, Konflik Ekonomi, Konflik Budaya **dikurangi** jumlah konflik yang sudah ditangani oleh Kesbangpol. Jumlah Konflik Sara harus sama dengan 0 (Nol) merupakan nilai yang harus dicapai karena bila terdapat kasus tidak sama dengan 0 (Nol) maka Kesbangpol dianggap gagal karena kasus konflik yang muncul dimasyarakat yang mengganggu jalanan nya roda perekonomian di Kabupaten Katingan. Kasus-kasus yang dianalisis yang hanya dapat menimbulkan pontensi konflik di Kabupaten Katingan. Penjelasan Hubungan sasaran, indikator dan meta indikator pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formula Indikator
1.	Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (Semangat dalam Persatuan dan Kesatuan)	Jumlah kasus SARA	Jumlah Konflik sosial, Konflik Agama, Konflik Suku/Ras, Konflik Ekonomi, Konflik Budaya – Jumlah Kasus yang sudah ditangani oleh Kesbangpol

Kinerja sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat dari tahun sebelumnya dengan indikator Persentase Penyelesaian Konflik pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Strategis	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 Thn target Akhir
			Target	Realisasi	%		
1.	Jumlah kasus SARA	0	0	0	100%	0	100%

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator sasaran Jumlah Konflik Sara Tahun 2023 adalah 0 ini dinyatakan **BERHASIL**, hal ini ditunjukkan dengan realisasi sebesar 100% sesuai dengan target di tahun ini yang berarti capaian untuk indikator ini tercapai 100% (Sangat Baik). Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja beberapa tahun terakhir, seiringnya dengan telah dimulainya tahapan untuk Pemilihan Umum baik Pemilu maupun PILKADA Tahun 2024, maka kondisi ini harus dikelola dengan baik karena berpotensi menimbulkan dari perselisihan politik yang dapat memicu timbulnya konflik sosial/sara.

Dari penjelasan pada point (1) diatas telah dijabarkan secara spesifik target dan realisasi kinerja serta capaian Badan Kesatuan Bangsa di Tahun 2023 dan akan dibandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun 2012 yang akan disajikan kedalam tabel 3.1 berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Satuan	Realisasi Kinerja				Target Renstra 2023
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Nilai Sakip	Predikat	B	B	B	B	B
2.	Jumlah Konflik Sara	Kasus	0	0	0	0	0

Realisasi dan capaian pada tahun 2020 memiliki tidak memiliki perbedaan realisasi dengan tahun 2023, hal itu disebabkan oleh kasus-kasus yang ada di Kabupaten Katingan dapat diredam dan dapat diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan supaya tidak menjadi konflik yang berkepanjangan / jumlah kasus dikurangi jumlah kasus yang terselesaikan sehingga kasus untuk tahun 2020 menjadi 0 kasus dengan capaian 100%.

Tahun 2023 merupakan tahaun dimana Indonesia sudah mulai bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19 yang terjadi kurang lebih 2 tahun. Kegiatan yang semula pada tahun 2021 banyak dilakukan secara daring dan jumlah peserta yang dibatasi, pada tahun 2022 ini mulai diselenggarakan secara luring dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Penyelenggaraan kegiatan Gelar Kebangsaan yang semula hanya dihadiri 300 tamu, tahun 2022 ini mulai membuka acara untuk umum, sehingga jumlah yang hadir mencapai hampir 600 orang. Pada masa pemulihan ini lah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan segala keterbatasannya dapat memenuhi target tujuan perangkat daerah yaitu meningkatkan kondusifitas daerah dan sasaran strategis yaitu penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat. Baik tujuan dan sasaran memiliki indikator yang sama yaitu penyelesaian konflik sosial.

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini, di antaranya:

- a) Dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Katingan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
- b) Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Katingan, seperti FKUB, Tim Kewaspadaan Dini /Kominda, FPK, dan FORKOPIMDA.
- c) Dukungan warga Yogyakarta secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Katingan.
- d) Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan Kesbangpol sendiri.

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Terdapat 5 (lima) program eksternal dan 1 (satu) program internal yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. Berikut tabel Program, Indikator Program, Target, dan Realisasi serta Capaian Kinerja Program pada tahun 2023 ini :

NO	PROGRAM	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan pelayanan administrasi / Total Unit Kerja Internal x 100%	75%	75%
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAAN	Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti sosialisasi / Total Pemangku Kepentingan di Katingan x100%	90%	98%
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan	Jumlah partai politik yang mengikuti sosialisasi / Total Parpol yang disasar x 100%	90%	100%
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Jumlah Ormas yang sudah melakukan pendaftaran / Total Ormas di Kabupaten Katingan x 100%	90%	90%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kecamatan yang diawasi keamanannya	Jumlah kecamatan yang diawasi / Total Kecamatan x 100%	90%	92%

Penjelasan capaian kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan indikator program persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tercapai 98% dari target 90%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta dikali 100%. Pada tahun 2023 ini jumlah peserta yang ditingkatkan pemahamannya dan menjalani post test sebanyak 150 orang, sedangkan yang meningkat pemahamannya sebanyak 147. Maka perhitungannya $(147/150) \times 100\% = 98\%$. Hal ini dapat tercapai karena antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan dan kinerja SDM yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila. Adapun faktor penghambatnya yaitu pelaksanaan kegiatan masih bersifat klasikal sehingga beberapa peserta terutama generasi muda sulit untuk memahami materi. Maka dari itu, akan dibuatkan silabus pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan Permendagri No. 71 tahun 2012 dengan ciri khas budaya lokal Kabupaten Katingan serta konsep kegiatan yang lebih menarik untuk ke depannya.

Secara umum, jumlah peserta yang disasar dalam program ini meningkat dibandingkan tahun lalu, di mana tahun lalu jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan Pancasila sebanyak 86 orang sementara tahun ini sebanyak 150 orang. Data perbandingan capaian sasaran program ini dapat dilihat dalam tabel berikut

Nama Program	Indikator / Formula	2022	2023
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAAN	Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa	96%	98%
	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya	83	147
	Jumlah peserta yang disasarkan	86	150



Dokumentasi Kegiatan wawasan Kebangsaaan



Dokumentasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Kepada Guru dari Sekolah Penggerak Kabupaten Katingan

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini yaitu Persentase partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan. Untuk indikator tersebut memiliki formula dengan **Jumlah Partai Politik yang mengikuti Sosialisasi / Jumlah Partai Politik yang disasar x 100%**. Dari target indikator yaitu 90% realisasi yang tercapai 100%. Hal itu dibuktikan dalam Kegiatan Sosialisasi kepada Partai Politik dalam Hal aturan-aturan untuk penggunaan dana Hibah agar tepat sasaran dalam penggunaannya dalam hal ini Jumlah partai politik yang disasar sebanyak 10 parpol, karena 10 parpol tersebut mendapatkan bantuan keuangan parpol dari Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kesbangpol. Di tahun 2023 Parpol yang mengikuti kegiatan sosialisasi 10 parpol dari 10 parpol yang disasar sehingga didapat $(10/10) \times 100\% = 100\%$ dari target 90%. Maka realisasi program ini telah mencapai 100%, hal ini didorong dari faktor karena semua partai politik wajib melaksanakan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana APBD Kabupaten Katingan tersebut.

Nama Program	Indikator / Formula	2022	2023
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan	90%	100%
	Jumlah partai politik yang mengikuti sosialisasi	9	10
	Jumlah partai politik yang disasarkan	10	10



Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi, yang diformulasikan dengan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan pendaftaran / total Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Katingan x 100%. Pada tahun 2023 jumlah yang ditargetkan sebanyak 100 organisasi, yang sudah melaksanakan pendaftaran SKT/melaporkan keberadaan sebanyak 96 organisasi. Sehingga $(96/100) \times 100\% = 96\%$ dari target 90%.

Target program ini dapat tercapai karena adanya antusiasme ormas dalam mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan juga menjalin kerjasama / bermitra dengan beberapa ormas seperti Dewan Adat Dayak (DAD), Badan Narkotika Kabupaten Katingan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim terpadu P4GN dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dimana bersama Kesbangpol organisasi tersebut menyelenggarakan sosialisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi.

Nama Program	Indikator / Formula	2022	2023
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	90%	96%
	Jumlah partai politik yang mengikuti sosialisasi	85	96
	Jumlah partai politik yang disasarkan	95	100



Dokumentasi Kegiatan Bersama Ormas

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Sekolah-sekolah, terlebih lagi ada beberapa sekolah belum melaporkan SK Satgas Anti Napza. Selain itu, belum adanya rencana aksi dan panduan spesifik untuk kegiatan Tim Satgas sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam menyusun SK dan menjalankan tugas siswa-siswi sebagai Satgas Anti Napza. Untuk menindaklanjuti beberapa kendala yang terjadi, Badan Kesbangpol bekerja sama dengan Napza Crisis Center (NCC) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Katingan (BNNK) untuk memantau langsung dan mengadakan pembinaan ke sekolah-sekolah, serta menyusun rencana aksi bersama NCC dan Forum Anti Napza.



Dokumentasi Kegiatan Monev Bersama FKUB Kabupaten Katingan



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi P4GN di Kabupaten Katingan

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Indikator untuk mengukur ketercapaian program ini adalah persentase Persentase Kecamatan yang diawasi keamanannya dengan formulasi $\text{Jumlah Kecamatan Yang diawasi} \div \text{Total Jumlah Kecamatan Yang ada di Kabupaten katingan} \times 100\%$. Jumlah kecamatan yang diawasi di tahun 2023 sebanyak 12 Kecamatan (Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan

Mendawai, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Marikit, Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Bukit Raya) dari Jumlah 13 Kecamatan di Kabupaten Katingan. Sehingga $(12/13) \times 100\% = 92\%$. Target ini dapat tercapai karena TIMDU Penanganan Konflik dan Tim Kewaspadaan Dini melaksanakan selalu pemantau dalam pendeteksian terhadap ATHG yang dapat memicu konflik di Kabupaten Katingan.

Nama Program	Indikator / Formula	2022	2023
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kecamatan yang diawasi keamanannya	84%	92%
	Jumlah Kecamatan yang diawasi	10	12
	Total Kecamatan di Kabupaten Katingan	13	13



Dokumentasi Koordinasi Penanganan Orang Asing



Dokumentasi Kegiatan FORKOIMDA



Dokumentasi Kegiatan Deteksi Dini

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar Rp. 22,861,120,932.00 atau 98,31% dari total anggaran yang dialokasikan. Sebanyak 13,46% dialokasikan untuk mendanai kegiatan internal seperti Gaji Pegawai, Listrik, Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Perlengkapan Kantor serta penunjang lainnya. Sedangkan sebanyak 68,48% dialokasikan untuk Dukungan Pemilu Kepala Daerah yang dihibahkan kepada KPU Kabupaten Katingan dan Bawaslu Kabupaten Katingan dan sisa 18,06% anggaran dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran program.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 3.373.863.792	3.132.129.347	92,83
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 80.393.592	79.294.982	98,63
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 80.393.592	79.294.982	98,63
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.186.634.415	1.983.118.215	90,69
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.186.634.415	1.983.118.215	90,69
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 16.000.000	16.000.000	100
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 16.000.000	16.000.000	100
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 553.983.887	551.881.250	99,62
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 35.000.000	34.871.382	99,63
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 46.440.000	46.395.000	99,90
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.178.648	21.104.404	99,65
	4. Penyediaan Bahan/Material	Rp. 152.989.489	151.806.000	99,23
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 298.375.750	297.704.464	99,78
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 222.335.247	217.660.656	99,78
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 222.335.247	217.660.656	99,78
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 129.019.310	121.464.234	94,14
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 60.740.000	57.670.000	94,95
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 68.279.310	63.974.234	93,43

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.185.497.341	162.710.100	87,72
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 155.571.531	133.062.100	83,53
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 23.137.640	23.010.000	99,45
	3. Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 6.788.170	6.638.000	97,79
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAAN	Rp. 1.307.576.393	1.233.924.238	94,37
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.307.576.393	1.233.924.238	94,37
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 12.235.849	12.169.500	99,46
	2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 728.053.161	687.699.478	94,46
	3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 278.987.383	246.088.360	99,89
	4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 278.300.000	277.992.300	99,89
	5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 10.000.000	9.974.600	99,75
	6. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rp. 0	0	0
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. 16.061.845.000	16.061.507.100	100
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 16.061.845.000	16.061.507.100	100
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 3.000.000	2.882.100	96,07
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 15.924.895.000	15.924.895.000	100
	3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 133.950.000	133.730.000	99,84
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 1.529.482.038	1.479.205.018	96,71
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.529.482.038	1.479.205.018	96,71
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 5.200.000	5.198.450	99,97
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 1.422.297.038	1.372.297.038	96,48
	3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 101.985.000	101.709.530	99,73

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 0	0	0
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 543.320.000	536.099.630	98,67
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 543.320.000	536.099.630	98,67
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 5.000.000	4.996.000	99,82
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 450.000.000	450.000.000	100
	3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 83.320.000	76.120.000	91,36
	4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.000.000	4.983.630	99,67
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 437.506.797	418.255.599	95,60
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 437.506.797	418.255.599	95,60
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 7.391.609	7.320.050	99,03
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 625.188	624.750	99,93
	3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 216.000.000	211.360.000	97,85
	4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 97.790.000	97.098.199	99,29
	5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 2.500.000	2.142.600	85,70
	6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 113.200.000	99.710.000	88,08
	BELANJA OPERASI	23.031.399.548	22.643.460.276	98,32
	BELANJA MODAL	222.335.247	217.660.656	97,90
	TOTAL BELANJA	23.253.743.795	22.861.120.932	98,31

Bila dilihat dari tabel di atas pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terealisasi sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang telah disediakan, serapan anggaran tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yaitu 100% hal ini tercapai sebab Hibah untuk dukungan PILKADA

dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tersalurkan secara penuh. Semua Program tercapai secara baik walau ada rasionalisasi anggaran. Berikut ini merupakan tabel pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan Evaluasi Kinerja Katingan (SIPPEKAT)

TABEL PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN APLIKASI SIPPEKAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TRIWULAN IV		KET	PROGRAM	PAGU	TRIWULAN IV	
					REALISASI	%				REALISASI	%
1	Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (Semangat dalam Persatuan dan Kesatuan)	Jumlah kasus SARA	0	Jumlah Konflik sosial, Konflik Agama, Konflik Suku/Ras, Konflik Ekonomi, Konflik Budaya – Jumlah Kasus yang sudah ditangani oleh Kesbangpol	0	100	Target tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.373.863.792	3.132.129.347	92,83
								PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAAN	1.307.576.393	1.233.924.238	94,37
								PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.061.845.000	16.061.507.100	100
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.529.482.038	1.479.205.018	96,71
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	543.320.000	536.099.630	98,67

(LAKIP) Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TRIWULAN IV		KET	PROGRAM	PAGU	TRIWULAN IV	
					REALISASI	%				REALISASI	%
								KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
								PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	437.506.797	418.255.599	95,60

3.4. Analisis Efisiensi

Pada dasarnya reaktivasi sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sisa anggaran terjadi karena melakukan efisiensi. Sasaran Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (Semangat dalam Persatuan dan Kesatuan) tercapai 100% dengan efisiensi anggaran 1,69% yang diperoleh melalui belanja Tagihan Listrik dan Gaji PHL.

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (Semangat dalam Persatuan dan Kesatuan)	Konflik Sara	100%	98,31	1,69%

3.5. Kolaborasi Lintas Sektoral

Keberhasilan Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari bantuan serta dukungan mitra yang senantiasa bekerjasama. Mitra-mitra pendukung ini berasal dari berbagai instansi dan perwakilan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Katingan. Serta untuk memudahkan dalam menjalankan tugas, dibentuklah tim dan forum diantaranya :

a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB merupakan forum lintas agama yang dibentuk untuk melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan membina serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional khususnya di wilayah Kabupaten Katingan.

b) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

FPK dibentuk dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 720/92 Tahun 2023 Pembentukan Susunan Pengurus, Dewan Pembina dan Pegawai Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Katingan Tahun 2023 – 2024 dimana tugas dan fungsi dari forum ini adalah menjaga keutuhan NKRI khususnya di wilayah Kabupaten Katingan melalui tokoh-tokoh adat / suku / ras agar terhindar dari konflik antar suku fanatisme.

c) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Forkopimda merupakan Forum Koordinasi antar Pimpinan lembaga yang ada di Kabupaten Katingan, forum ini diketuai oleh Pj. Bupati Katingan dan beranggotakan dari Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, Unsur DPRD Kabupaten Katingan, Ketua Pengadilan Negeri, serta Ketua

Pengadilan Agama. Fungsi dari forum ini adalah mengkoordinasikan dan membahas masalah pemerintahan umum di Kabupaten Katingna dan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa di dukung oleh seluruh komponen dalam pelaksanaannya serta menjamin terlaksananya pemerintahan umum di Kabupaten Katingan

d) Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Katingan

Tim Kewaspadaan Dini termasuk dalam Komunitas Intelijen Daerah merupakan komunitas yang bertugas mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelijen, selain itu juga menggali dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari seluruh wilayah Kabupaten Katingan tentang segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas Kabupaten Katingan. Komunitas ini terdiri dari beberapa lembaga/instansi dinataranya Kesbangpol, Polres Katingan, Kodim 1019 Katingan, BIN, Kejari, Pol PP dan BAIS. Selain itu, tim ini juga bisa memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati terkait kebijakan yang berhubungan dengan deteksi dini dan peringatan informasi terhadap ATHG di wilayah Katingan.

e) Tim Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

Tim Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing dibentuk dengan Keputusan Bupati Katingan dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing serta konflik yang terjadi. Tim ini bertugas untuk memantau, mengkoordinasikan, merencanakan, mencari, menkomunikasikan informasi mengenai sebab akibat konflik yang terjadi serta juga dalam pendeteksian keberadaan orang asing dan ormas asing.

f) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan

KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Badan Kesbangpol bersinergi dengan KPU dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan mengenai demokrasi dan kepemiluan sebagai bentuk usaha meningkatkan pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum mendatang.

g) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Katingan

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Badan Kesbangpol bersama dengan KPU juga bekerjasama dengan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kepemiluan terutama untuk generasi muda, kelompok perempuan, kelompok difabel, marginal dan tokoh masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 6 dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan periode 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

4.1. Kesimpulan

Hasil Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan tahun 2023 pada disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023, indikator Jumlah Konflik Sara telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dari target 100% sehingga tercapainya IKU.
2. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 22.861.120.932 atau sebesar 98,31% dari total anggaran Rp. 23.253.743.795.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
2. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
3. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku.
4. Meningkatkan peran media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan antar suku